

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU SANTRI MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS *ENTREPRENEURSHIP*

Safrudin Aziz¹, Fajriyah²

^{1,2}*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Jawa Tengah
azieez@gmail.com¹, fajri.tea87@gmail.com²*

Abstract: *Research on the policy of increasing the quality of santri-based entrepreneurship in boarding school is caused by oblique image of society to pesantren salaf which only able to produce cadre of scholars but poor in development of santri entrepreneurship. Consequently alumni of salaf pesantren who do not have formal education majority can not take part in developing economic independence. Different from pesantren Al-Falah, entrepreneurship education shaped life skills development into vision and excellent programs for every santri. Extracting data in this research using observation method, interview and documentation. While data analysis is done through process of data reduction, display data and conclusion and verification. The results of this study indicate that pesantren has implemented a policy of improving the quality of santri optimally through the formulation of policies in accordance with the vision and mission of pesantren, policy implementation through life skills education and policy control through monitoring, evaluation and reward.*

Keywords: *the policy of entrepreneurship education, Pesantren, Life Skill Education*

Pendahuluan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki peran multidimensional. Peran ini sebagaimana dikemukakan Horikoshi, pesantren mengemban fungsi sosial sekaligus penyiaran ilmu agama.¹ Azra juga menguatkan, pesantren secara kelembagaan memegang tiga fungsi utama yakni fungsi transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, fungsi pemeliharaan tradisi Islam, dan fungsi reproduksi ulama.²

Sulthon dan Khusnuridlo juga menyebutkan pondok pesantren agar tetap eksis sepanjang zaman hendaknya memperhatikan tiga fungsi menyeluruh yaitu fungsi sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islam, sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial serta sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial.³

Sejalan dengan pendapat di atas, Nur Syam juga mengemukakan bahwa pondok pesantren sebagai sebuah institusi sosial idealnya mampu melaksanakan fungsi sebagai berikut: *pertama*, sebagai sumber nilai dan moralitas. *Kedua*, sebagai pendalaman nilai dan ajaran keagamaan. *Ketiga*, sebagai pengendali-filter bagi perkembangan moralitas dan kehidupan spiritual. *Keempat*, sebagai sumber praksis dalam kehidupan.⁴

¹ H. Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Balasin dkk. (Jakarta: P3M, 1987), hal. 232.

² Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 112.

³ M. Sulthon dan M. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: LakSbang Pressindo, 2006), hal. 8.

⁴ Nur Syam, "Kepemimpinan dalam Pengembangan Pondok Pesantren", dalam A. Halim dkk. (ed), *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 78-79.

Kelima, sebagai agen pengembangan masyarakat.⁵ Serta *keenam*, sebagai lembaga dakwah.⁶

Berbagai fungsi pesantren di atas tampak sekali bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan sosial memiliki eksistensi dalam mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat baik secara spiritual, sosial, kultural, *skill* serta ekonomi masyarakat turut ditentukan oleh pesantren melalui seperangkat program yang telah ditawarkannya.

Begitu pula dengan pesantren salaf (baca: tradisional) eksistensi, peran serta fungsi di atas harus mampu dikembangkan secara optimal melalui berbagai program. Padahal umumnya pesantren salaf sebatas menjadikan kyai sebagai sumber segala referensi, mengutamakan pembelajaran penguasaan ilmu agama semata, tidak memiliki kurikulum yang baku dan standar, lebih menekankan pola pendidikan dogmatis, jauh dari nilai-nilai pendidikan kritis, kreatif serta miskinnya kebijakan terhadap pengembangan mutu santri. Akibatnya pesantren salaf kurang siap menghadapi peradaban serta tantangan perubahan sosial.

Berbeda dengan sistem pendidikan pesantren salaf Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang Banyumas. Pesantren salaf yang didirikan dan diasuh oleh KH. Ahmad Sobri telah memiliki kebijakan dalam meningkatkan mutu santri. Kebijakan tersebut berbentuk seperangkat program pendidikan *entrepreneurship*. Kebijakan pendidikan *entrepreneurship* tersebut secara konkret menekankan aspek

⁵ Nur Syam, 'Pengembangan Komunitas Pesantren', dalam Moh Ali Aziz (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 121-131.

⁶ M. Yusuf Hasyim, "Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, (ed), *Dinamika Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, terj. Sonhaji Saleh (Jakarta: P3M, 1988), hal. 91.

pengembangan *life skills* (kecakapan hidup) guna mendidik kemandirian santri baik secara ekonomi, sosial maupun kultural, siap terjun bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan keterampilan yang dikuasainya.

Rancangan kebijakan tersebut menunjukkan pola pendidikan Pondok Pesantren salaf Al-Falah tampaknya telah mengalami perubahan yang bersifat modifikasi dari paradigma klasik beralih ke paradigma kontemporer. Artinya santri tidak sebatas berkewajiban mendalami ilmu agama melalui kitab-kitab *mu'tabarah* secara total. Namun memfasilitasi pendidikan *life skills* kepada setiap santri agar produk lulusannya siap berkiprah sekaligus mampu bersaing dengan lulusan sekolah formal lainnya menjadi kebijakan unggulan pada Pondok Pesantren Salaf Al-Falah. Sebab melalui upaya tersebut, produk lulusan Pondok Pesantren Al-Falah selain memiliki penguasaan ilmu agama secara komprehensif, santri dituntut memiliki kecakapan secara utuh baik dibidang intelektual, emosional, sosial, spiritual serta seperangkat *life skills*.

Mencermati uraian di atas, penelitian pendidikan *entrepreneurship* sebagai salah satu kebijakan peningkatan mutu santri di Pondok Pesantren Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang penting dilakukan. Agar mengerucut pada pembahasan secara substansial, tulisan ini akan mengkaji tentang perumusan kebijakan, implementasi dan kebijakan serta model pengendalian kebijakan peningkatan mutu santri melalui pendidikan *entrepreneurship*.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perumusan kebijakan, implementasi serta model pengendalian kebijakan pendidikan *entrepreneurship* sebagai alternatif peningkatan mutu santri di Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang Banyumas tahun 2017.

Metode

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang implementasi kebijakan peningkatan mutu santri melalui pendidikan berbasis *entrepreneurship* di Pondok Pesantren Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Agar realitas di lapangan dapat dipahami secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan *indept interview* atau wawancara mendalam terhadap pengasuh, ustadz/ustadzah, pengurus, dan santri di lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah, pengamatan peran serta *participant observation*, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, reduksi data (*reduction data*) yakni merangkum, memilih data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu.⁸ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Kedua, penyajian data (*display data*). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

⁷ Pendekatan kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain pada Pondok Pesantren Al-Falah Jatilawang Banyumas, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas dan apa adanya. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), hal. 3.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 339.

flowchart, dan sejenisnya. Adapun dalam menyajikan data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. *Ketiga, conclusion drawing* dan *verification* yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹

Hasil dan Pembahasan

Pondok Pesantren Salaf Al-Falah berlokasi di jalan Pesantren Mangunsari Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Berada di atas tanah seluas 1.087 meter persegi. Al-Falah merupakan salah satu pesantren salaf yang mengelola sistem pembelajaran berbasis kitab kuning dengan model pembelajaran *bandongan* dan *sorogan*. Kurikulum pendidikan keagamaan Pondok Pesantren Al-Falah mengadopsi sistem pendidikan pondok pesantren salaf di Ploso dan Tebuireng semenjak 1978 hingga sekarang. Pondok Pesantren Al-Falah ini didirikan dan diasuh oleh seorang kyai kondang di wilayah Banyumas yakni KH. Ahmad Sobri. Hingga saat ini, pesantren Al-Falah memiliki sejumlah 25 ustadz dengan spesialisasi pendidikan sangat beragam.

Selain berorientasi pada penguasaan kitab kuning, pesantren ini memiliki kebijakan mengembangkan program pendidikan *entrepreneurship* bagi setiap santri. Adapun ruang lingkup kebijakan peningkatan mutu

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 345.

santri melalui pendidikan berbasis *entrepreneurship* pada pondok pesantren Al-Falah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rumusan Kebijakan

Secara teoritik, kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰ Menurut Ali Imron kebijakan ialah suatu kearifan pemimpin kepada bawahan atau masyarakatnya.¹¹ Pengertian tersebut menegaskan kebijakan merupakan sebuah keputusan yang dihasilkan dari hasil pemikiran tentang garis dasar yang menjadi pedoman dan arah dalam melakukan sebuah pekerjaan dalam usaha mengatasi masalah atau mencapai sebuah tujuan. Kebijakan merupakan sebuah alternatif untuk memecahkan problematika yang ada ataupun sesuatu yang bersifat untuk mengembangkan program berkemajuan pada sebuah lembaga.

Rumusan kebijakan Pondok Pesantren Al-Falah dilakukan secara teoritik dan praktik. Perihal tersebut dibuktikan dengan visi Pesantren Al-Falah yaitu menumbuhkembangkan jiwa *entrepreneurship* santri dengan tanpa menghilangkan jiwa kesantriannya. Visi tersebut didukung oleh misi mencetak santri yang mandiri, berkarakter dan bisa bermanfaat bagi orang lain.¹² Dari rumusan visi dan misi tersebut, diturunkan pada berbagai

¹⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), Cet. 1, hal. 263.

¹¹ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan Masa Depan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 16-17.

¹² Dikutip dari Profil Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang pada tanggal, 18 Juli 2016.

kegiatan pendidikan *life skills* untuk menumbuhkembangkan jiwa *entrepreneurship* setiap santri.¹³

Perumusan visi dan misi dalam mengembangkan kebijakan pendidikan menurut berbagai ahli menjadi satu keharusan agar kegiatan santri mengerucut ke satu arah yakni rumusan visi. Dalam arti lain, berbagai kegiatan pendidikan *entrepreneurship* di pesantren Al-Falah harus memiliki tujuan yang jelas. Sehingga pelaksanaan kegiatan, tujuan, dan misi benar-benar diupayakan guna mencapai visi pesantren.

Beberapa kegiatan *life skills* yang dikembangkan pesantren Al-Falah sebagai upaya mencapai visi di atas di antaranya: *pertama*, pendidikan *life skills* bidang kursus meliputi: kursus setir, kursus pertukangan, dan kursus menjahit. *Kedua*, bidang pertanian. *Ketiga*, bidang usaha mencakup: usaha dalam bentuk koperasi dan produksi air minum.¹⁴ Bidang-bidang tersebut dikelola oleh beberapa penanggung jawab bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penanggung jawab bidang selain menjalankan kegiatan secara terencana, sistem monitoring dan evaluasi juga dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait secara transparan di lingkungan pesantren Al-Falah.

Berbagai kegiatan *entrepreneurship* yang dikembangkan Pesantren Al-Falah pada prinsipnya bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kemandirian dari para santri. Jiwa kemandirian bukan hanya sekedar santri mampu melaksanakan pekerjaan tertentu, tetapi juga melatih

¹³ Hasil Wawancara dengan Gus Hasan selaku pengasuh di Pondok Pesantren Salafi Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang pada tanggal, 18 Juli 2017.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Gus Hasan selaku pengasuh di Pondok Pesantren Salafi Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang pada tanggal, 18 Juli 2016.

keberanian dan mental santri untuk mengambil sikap ataupun tindakan, serta bertindak dan bekerja secara langsung di lapangan.

Perihal di atas, sesuai dengan konsep yang dikemukakan Subarsono bahwa perumusan kebijakan harus diikuti oleh penentuan program dan strategi, yaitu kesesuaian dengan visi dan misi, dapat diimplementasikan, harus memberikan akses yang luas dan adil bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik dan produk yang mereka butuhkan, mendasarkan pada kriteria penilaian yang jelas dan transparan.¹⁵ Selanjutnya, penentuan pelaksana dari program kebijakan serta monitoring dan evaluasi menjadi bagian melekat di dalamnya.¹⁶

2. Implementasi Kebijakan

Sebuah perencanaan atau perumusan kebijakan yang matang akan sangat mempengaruhi hasil yang optimal pula. Akan tetapi perumusan kebijakan juga perlu didukung oleh konsistensi serta sesuai dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan alternatif yang terbaik sebagai solusi pemecahan masalah. Sebab tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya.¹⁷

Untuk mengendalikan implementasi kebijakan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan di antaranya: *pertama*, mengimplementasikan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, utamanya kegiatan-kegiatan yang penting. *Kedua*, melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka

¹⁵ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 19-21 .

¹⁶ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan...*, hal. 49-51

¹⁷ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan...*, hal. 64.

pengadopsian. *Ketiga*, melakukan proses tinjauan manajemen terhadap hasil *monitoring* dan evaluasi yang telah dilakukan. *Keempat*, mencari cara-cara pengembangan berkelanjutan yang sesuai dengan sekolah.¹⁸

Pada tahapan implementasi kebijakan pendidikan *entrepreneurship* di Pesantren Al-Falah tidak sebatas kursus *life skills* sebagaimana dikemukakan di atas. Akan tetapi pengembangan kegiatan pendidikan *entrepreneurship* non kursus juga dilakukan melalui: a) kegiatan yang melekat di sekolah (ekstrakurikuler) seperti: pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), pelatihan komputer, pelatihan percakapan bahasa Inggris. b). Kegiatan yang tidak melekat di sekolah seperti: pelatihan stir mobil, menjahit, seni baca Al Qur`an, kajian kitab kuning, mujahadah rutin, peringatan hari besar Islam, produksi air minum kemasan, pembuatan bedug (bersifat insidental sesuai pesanan). Mujahadah dan peringatan hari besar Islam di pesantren Al-Falah juga menjadi bagian dari pendidikan *entrepreneurship*. Upaya tersebut dimaksudkan santri diasah secara spiritual dalam mengimplementasikan pendidikan *entrepreneurship* agar santri memiliki karakter jujur, berani, menghadirkan Allah dalam menjalankan berbagai kegiatan, tawakal, dan sabar. Sementara peringatan hari besar Islam menekankan pada pelibatan langsung seluruh santri dalam mengelola kegiatan dari mulai tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai tahap pelaporan.

Implementasi kebijakan pendidikan *entrepreneurship* secara total harus dijalankan oleh seluruh santri. Pada tahap implementasi ini dimaksudkan untuk:

¹⁸ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 124.

a. Memberikan peluang kepada setiap santri untuk memilih program yang sesuai dengan bakat dan minatnya

Setiap santri diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan atau menunjukkan kemampuan *entrepreneurship*-nya agar tersalurkan dengan baik. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya memberikan kesempatan kepada santri untuk berani tampil, berpartisipasi secara langsung dilapangan. Dengan demikian sistem pendidikan bagi santri di pesantren ini tampaknya tidak mengenal dikotomi ilmu. Perihal ini selain inisiatif dari pengasuh beserta dewan *asatidz*, tuntutan dan kebutuhan zaman tampaknya sudah dipahami agar segera direspon secara serius oleh pesantren Al-Falah. Selain itu, dewan *asatidz* beserta pengasuh yang cukup berpengalaman serta memiliki SDM yang unggulan turut melahirkan implementasi kebijakan tersebut.

b. Pemanfaatan lahan yang ada sebagai sarana santri

Seiring dengan terbatasnya lahan serta dana, lahan milik pengasuh menjadi tempat alternatif dalam mengembangkan program pendidikan *entrepreneurship*. Sehingga pelaksanaan program akhirnya dapat terkontrol secara langsung oleh pengasuh, ustadz maupun pengurus. Pengawasan secara langsung ini menunjukkan keseriusan bagi pesantren Al-Falah dalam mengembangkan pendidikan *entrepreneurship* secara optimal. Hal tersebut didukung oleh Engkoswara dan Komariah bahwa monitoring dan evaluasi (monev) merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama yaitu untuk memastikan keberhasilan program.¹⁹ Monev ini dimaksudkan agar pelaksanaan program tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditentukan, dan

¹⁹ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan* (Bandung; Alfabeta, 2011), hal. 219.

membangun *early warning system* sebagai bagian penting untuk memastikan juga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.²⁰ Sikap serius sebagaimana dilakukan pesantren Al-Falah semata-mata bertujuan agar santri memiliki jiwa *entrepreneurship* dengan menguasai seperangkat keterampilan guna menghadapi tantangan global yang semakin berkembang.

c. Kerjasama dengan alumni, masyarakat dan lembaga lain

Salah satu tercapainya mutu sebuah lembaga adalah pengakuan dari orang lain, masyarakat maupun lembaga lain secara luas. Untuk mengembangkan mutu santri dalam mengembangkan pendidikan *entrepreneurship* diperlukan kebijakan kerjasama dengan alumni, masyarakat serta lembaga lain yang dapat mendukung kesuksesan implementasi program.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga atau menjalin silaturahmi dengan lembaga lain, masyarakat luas dan alumni yaitu pesantren mengadakan kegiatan rutin bulanan. Program ini bermanfaat bagi santri khususnya dalam melakukan pembelajaran *entrepreneurship* secara langsung, belajar tentang etika berkomunikasi dan berhubungan secara langsung dengan orang lain dan sebagainya.

d. Kebijakan menyamaratakan santri tanpa melihat latar belakang dan kemampuannya

Santri yang belajar di Pondok Pesantren Al-Falah memiliki latar belakang keluarga, sosial, ekonomi serta kecerdasan yang berbeda-beda. Semua santri diperbolehkan mengikuti pendidikan *entrepreneurship* sesuai dengan minat dan taraf kemampuannya masing-masing. Namun

²⁰ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hal. 707.

setiap santri yang sudah mengambil program pendidikan *entrepreneurship*, mereka harus memiliki memiliki niat, semangat, kemauan yang tinggi, serta ketekunan. Dalam perihal ini, semua santri diberikan arahan bahwa setiap hasil yang didapatkan tentu sangat berpengaruh atas usaha yang dilakukannya. Untuk itu penekanan keseriusan dalam proses harus menghiasi diri setiap santri.

e. *Kebijakan waktu*

Secara teknis, implementasi pendidikan *entrepreneurship* di Pesantren Al-Falah bersifat kondisional atau kultural alamiah.²¹ Hal tersebut disebabkan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang mengajar. Namun dalam pelaksanaan program-programnya pengurus dan pengasuh sangat memegang target-target dari program yang telah ada.

3. *Pengendalian Kebijakan*

Proses implementasi kebijakan pendidikan *entrepreneurship* harus dilakukan secara serius serta dilakukan pengendalian kebijakan. Pengendalian kebijakan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut: *pertama*, monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan. *Monitoring* dan *evaluating* (monev) merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama yaitu untuk memastikan keberhasilan program.²² Adapun Monev dapat dilakukan dengan metode: survey ke lapangan, pemanfaatan ahli melalui delphi ataupun hasil diskusi kelompok terfokus serta pengawasan di balik meja (*desk monitoring*)

²¹ Wawancara dengan Gus Hasan selaku pengasuh di Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang pada tanggal, 14 Juli 2017.

²² Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan...*, hal. 219.

dengan memanfaatkan metode triangulasi, baik triangulasi data maupun triangulasi teori.²³

Kedua, evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program mencapai sasaran yang diharapkan.²⁴ Di mana kebijakan dipandang sebagai instrumen untuk penanganan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melakukan peranannya

Ketiga, pengganjaran kebijakan. Untuk mengendalikan kebijakan, pengganjaran merupakan hasil akhir dari pengendalian kebijakan untuk mencapai tujuannya. Pengganjaran didapat sesuai dengan apa yang telah dicapai dalam proses kebijakan, yang berupa keberhasilan ataupun kegagalan. Namun pengganjaran kebijakan ini lebih sering digunakan pada proses kebijakan publik di pemerintahan.²⁵

Pengendalian kebijakan peningkatan mutu santri melalui pendidikan berbasis *entrepreneurship* Pesantren Al-Falah dilakukan melalui proses monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pengganjaran kebijakan. Monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan pendidikan *entrepreneurship* Pesantren Al-Falah dilakukan secara langsung oleh pengasuh, pengurus dan dewan *asatidz*. Monitoring ini dilakukan terhadap penanggung jawab program. Untuk itu, masing-masing bidang harus memiliki penanggung jawab agar kegiatan atau program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya masih bersifat kondisional.

²³ H. M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hal. 114.

²⁴ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan...*, hal. 374.

²⁵ Riant Nugroho, *Public Policy...*, hal. 738-739.

Berikutnya adalah tahap evaluasi. Tahap ini berfungsi menunjukkan bagaimana hasil dari pelaksanaan sebuah program telah berjalan secara efektif. Artinya melalui evaluasi berbagai kekurangan program akan segera diketahui akar penyebabnya sekaligus diperoleh berbagai alternatif solusi yang terbaik.

Adapun tahap pengganjaran berarti santri mendapatkan pengakuan atau *reward* berupa barang atau uang dari pihak pesantren. Pengganjaran ini menandakan santri telah diakui kompetensinya dalam berbagai bidang yang telah dikuasai. Kompetensi pertukangan yang dimiliki seorang santri misalnya, akan mendapatkan rekomendasi dari pihak pesantren untuk merencanakan pembangunan fisik, rehab gedung, membuat desain dan menghitung rancangan bangunan dan sejenisnya. Begitu pula dengan kompetensi dalam bidang pertanian, sopir, minuman kemasan dan sebagainya. Semua kompetensi awalnya dipersembahkan untuk kemaslahatan umat. Meskipun selebihnya diperuntukan pada aspek perolehan finansial santri.

Simpulan

Kebijakan peningkatan mutu santri melalui pendidikan berbasis *entrepreneurship* di Pesantren Al-Falah memuat tiga tahapan kebijakan yaitu: perumusan kebijakan, implementasi serta pengendalian. Perumusan kebijakan peningkatan mutu santri dilakukan melalui penentuan program dan strategi membentuk jiwa *entrepreneurship* santri. Perumusan ini didukung oleh visi Tahap berikutnya implementasi kebijakan melalui pendidikan *life skills* dalam bidang kursus, bidang pertanian dan bidang usaha.

Adapun tahap terakhir berupa pengendalian kebijakan berupa monitoring, evaluasi dan pengganjaran. Semua itu dimaksudkan

Safrudin Aziz: *Kebijakan Peningkatan Mutu...*

agar santri mampu menjalani hidup secara mandiri, memiliki keterampilan, sekaligus berani menghadapi tantangan, permasalahan dan tuntutan kehidupan secara global. Tiga tahap itu menjadi alternatif mengembangkan kebijakan pendidikan Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Engkoswara dan Komariah, Aan. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Bandung; Alfabeta, 2011.
- Hasbullah, H. M. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Hasyim, M. Yusuf. “Peranan dan Potensi Pesantren dalam Pembangunan”, dalam Oepen, Manfred dan Karcher, Wolfgang (ed). *Dinamika Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, terj. Sonhaji Saleh. Jakarta: P3M, 1988.
- Horikoshi, H. *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Balasin dkk. Jakarta: P3M, 1987.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhaimin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Nata, Abuddin (ed). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Profil Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang, diambil pada tanggal, 18 Juli 2016.
- Sam, Nur. “Pengembangan Komunitas Pesantren”, dalam Aziz, Moh. Ali (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulthon, M. dan Khusnuridlo, M. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: LakSbang Pressindo, 2006.

Safrudin Aziz: *Kebijakan Peningkatan Mutu...*

Syam, Nur. “Kepemimpinan dalam Pengembangan Pondok Pesantren”, dalam A. Halim dkk. (ed), *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Tim Penyusun. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.

Wawancara dengan Gus Hasan selaku pengasuh di Pondok Pesantren Salafi Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang pada tanggal, 18 Juli 2016.

Wawancara dengan Gus Hasan selaku pengasuh di Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang pada tanggal, 14 Juli 2017.